



RENJA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025, ini dapat disusun dan diselesaikan.

Dengan selesainya Rencana Kerja ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini.

Semoga laporan ini dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua.

Dalam penyusunan dokumen ini masih perlu perbaikan untuk kesempurnaan dokumen Renja pada tahun berikutnya dan kami berharap masukan dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan kebaikan kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Papua kedepannya.

Jayapura, 17 Pebruari 2025



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. Pendahuluan	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2 Analisis kinerja pelayanan.....	10
2.3 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.....	28
2.4 Isue penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.....	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	29
3.2 program dan kegiatan	36
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
BAB IV. PENUTUP	38

LAMPIRAN

- **RENJA 2025**
- **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH PRVINSI PAPUA YA, 2024 - 2026**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun, sebagai penjabaran Rencana Strategi (Renstra) Biro Organisasi TA. 2024-2026 memuat rencana pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan, dengan adanya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Biro Organisasi menetapkan target yang akan dicapai pada masa transisi Dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 yang kemudian dapat diimplementasikan dalam penetapan Renja Biro yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi.

Sebagai dokumen rencana tahunan yang merupakan penjabaran Perangkat daerah, Renja Biro Organisasi mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah ataupun Rencana perubahan merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Rancangan Rencana Kerja dan Rencana Perubahan merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh

mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah..

Mengingat arti strategis dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan Penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Perumusan rancangan akhir
- e. Penetapan

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Bito Organisasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2025 tentang APBD Provinsi Papua;
8. Peraturan Gubernur Papua nomor 1 tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Provinsi Papua;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Cara Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah sebagai pedoman dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai implementasi dari visi dan misi Biro Organisasi, yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program yang mengacu pada RKPD dan berpedoman pada RENSTRA SKPD.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program/kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024.
- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2025 dan RPD Tahun 2024- 2026.
- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2025.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan Renja Tahun 2025.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Renja Tahun 2025.
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.4. **Sistematika** Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Riview terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Biro Organisasi meliputi seluruh program dan kegiatan, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan RENSTRA Biro, melalui evaluasi akan diketahui capaian kinerja, output dan outcome, apa yang menjadi kendala , serta rencana aksi yang akan dilakukan.

Pada tahun 2025 Biro Organisasi melaksanakan 2 Program yaitu :

NO	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	11	2.180.041.000,00
2	Program Penataan Organisasi	2	8	2.883.603.520,00
	TOTAL Rp			6.580.041.000,00

Dibawah ini terdapat realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Biro Organisasi TA. 2024

NO	URAIAN	JUMLAH	REALISASI	PERSENTASE
1	BELANJA OPERSIONAL	5.241.901.510	5.205.169.833.00	99,30
2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.241.901.510	5.205.169.833.00	99,30
	JUMLAH	5.241.901.510	5.205.169.833.00	99,30

Pengukuran IKU Biro Organisasi Tahun 2019 sd 2023 dan Pengukuran IKU Biro Organisasi Tahun 2019 sd 2023 dibandingkan Dengan Capaian Dan Target Pada RPJMD Provinsi Papua, dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2 terlampir.

2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan**

Renja 2024 merupakan tahun ke-1 setelah selesai masa kepemimpinan Gubernur TA. 2019-2023 dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 sebagai pedoman pembangunan untuk TA 2024-2026, Indikator Kinerja Biro Organisasi yang termasuk dalam RPD Provinsi Papua terdiri atas 3 Indikator, tergambar Tabel 1.3 Terlampir.

2.3. **Reviu terhadap RKPD dapat dilihat pada Tabel terlampir**

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Biro Organisasi telah menyusun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan sesuai TUSI Organisasi, Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan riil

organisasi telah terekam ataukah belum.dapat dilihat pada Tebel 2.1 dalam lampiran.

Indikator Kinerja Biro Organisasi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran pada Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua TA 2024-2026, terdiri atas :

Tabel 1.3

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode 2023	Taarget Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir tahun 2026
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67	75,05	80,05	80.50	80.50
2	Nilai SAKIP	Nilai	66,05	75,39	80,05	80,50	80,50
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	95	95	95	95	95

2.4. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka isu-isu strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua dapat dikelompokkan kedalam 5 (lima) kelompok isu strategis sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya *kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:***

“Salah satu tugas Biro Organisasi antara lain untuk menyiapkan bahan kebijakan penataan desain struktur tugas dan fungsi Perangkat Daerah

dengan mendasarkan pada keseimbangan beban kerja sehingga tidak terjadi duplikasi maupun kekosongan penyelenggaraan tugas fungsi.

“Penataan birokrasi pemerintah daerah yang menjadi isu sentral saat ini adalah perlunya reformasi birokrasi dalam pengelolaan pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata masing-masing daerah. Keberadaan organisasi perangkat daerah untuk mengakomodir kewenangan daerah dengan prinsip miskin struktur kaya fungsi akan membentuk konfigurasi besar. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proposisional, efektif dan efisien.

Kondisi riil di daerah yang masih relevan saat ini terkait kelembagaan di daerah bahwa adalah belum dilaksanakan penyesuaian peraturan terkait pelaksanaan pemerintahan baik di pemerintah pusat dan pemerintahan di papua, dimana yang diharapkan pemerintah pusat agar dilaksanakan penyetaraan jabatan serta penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan belum dilaksanakan di provinsi papua, hal ini mengakibatkan kelembagaan di Provinsi Papua masih sangat besar sehingga regulasi yang dikeluarkan dari pemerintah pusat belum dapat diterapkan dengan baik di provinsi bahkan kabupaten kota di Papua.

2. ***Adanya Kewenangan Kekhususan***

Kewenangan kekhususan Provinsi Papua sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan Daerah Provinsi Papua sesuai undang undang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sehingga diperlukan penataan kelembagaan Pemerintah

Provinsi Papua sebagai salah satu kekhususan tersebut;

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksana Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, dan Pemerintah Provinsi Papua telah mengakomodirnya dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perdasus ini mengaktualisasikan kekhususnya dalam kelembagaan pemerintah provinsi dan kabupaten kota di papua, hal ini ditindaklanjuti dengan disusunya Perda dan Perbup/Perwal di Kabupaten Kota pada tahun yang sama tentang kelembagaan perangkat Daerah dan kelurahan,Pengaturan kelembagaan yang melaksanakan urusan kekhususan dimaksudkan sebagai dasar bagi perangkat daerah di Provinsi Papua maupun Kabupaten/Kota yang mengawal dan memastikan urusan Kelembagaan Pemda Provinsi Papua dapat menjadi salah satu alat dalam memberikan kontribusi pembangunan bagi masyarakat di tanah Papua.

3. ***Fasilitasi penataan kelembagaan Kabupaten /Kota***

Terbentuknya organisasi perangkat daerah di Kab / Kota sesuai dengan besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria, pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan.

4. **Tumpang Tindihnya Urusan Pada SKPD**

Dalam hal melakukan penataan kelembagaan di wilayah provinsi papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perangkat Daerah beserta turunannya peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah yang mengakomodir penataan kelembagaan perangkat daerah, menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota untuk melakukan penataan kelembagaan sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan karakteristik di daerahnya. Pada umumnya kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota dibentuk untuk melaksanakan tugas yang berdasarkan pemetaan urusan yang dibuat Pada peraturan pemerintah ini. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat di beberapa Kabupaten/kota yang mempunyai kemiripan nama bagian atau sub bagian, sehingga mengambil alih fungsi atau tugas dari dinas/badan yang mempunyai tugas teknis tersebut. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya ketidaksesuaian dan keselarasan Urusan tugas / Tupoksi antara SKPD. Di masing-masing Kabupaten/Kota.

5. Koordinasi **Pemerintah** Kabupaten/Kota pada Pemerintah Pusat

Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas membina, memfasilitasi kabupaten/kota yang berada dalam cakupan wilayah pemerintahannya dalam melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah agar Kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria, pembentukan suatu organisasi perangkat daerah untuk ditetapkan

6. Penataan SDM aparatur yang kompeten dan proporsional

Analisa beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, atau dengan kata lain analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seorang petugas.

Analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang dapat dilimpahkan kepada seorang pegawai, atau dapat pula dikemukakan bahwa analisis beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan beban kerja dalam waktu tertentu.

Dengan cara membagi isi pekerjaan yang mesti diselesaikan oleh hasil kerja rata-rata satu orang, maka akan memperoleh waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan pekerjaan tersebut. Atau akan memperoleh jumlah pegawai yang dibutuhkan melalui jumlah jam kerja setiap pegawai tersebut.

Dalam manajemen kepegawaian, kegiatan penerimaan dan penempatan pegawai mutlak harus dilakukan didalam satu unit organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Kegiatan manajemen kepegawaian adalah kegiatan untuk mendapatkan landasan guna penerimaan dan penempatan pegawai yang pada awalnya dilakukan terlebih dahulu melalui analisis jabatan (job analysis) yang berpedoman pada PERMENPAN RB Nomor 11 /2024 tentang Jabatan Pelaksana dilingkungan Instansi Pemerintah, yang berarti suatu kegiatan untuk memberikan gambaran tentang syarat-syarat jabatan (job specification) yang diperlukan bagi setiap pegawai yang akan diterima dalam menduduki suatu jabatan didalam suatu organisasi.

Perencanaan kebutuhan pegawai suatu instansi mutlak diperlukan dalam

rangka memenuhi kebutuhan pegawai yang tepat baik jumlah dan waktu, maupun kualitas baik kuantitatif maupun kualitatif yang dirinci menurut jabatan dan unit kerja. Dengan demikian perencanaan, perekutan, penempatan dapat dilakukan sesuai kompetensi dan proporsional. kebutuhan ANJAB dan ABK serta Evaluasi sangat dibutuhkan bahkan menjadi dasar penilaian tambahan penghasilan bersyarat bagi ASN. kedepan besaran tunjangan kinerja akan dihitung sesuai dengan kelas jabatan (job grade). Kelas jabatan untuk masing-masing jabatan struktural ataupun fungsional disusun berdasarkan hasil evaluasi jabatan yang dilakukan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan. Jabatan yang dievaluasi adalah jabatan-jabatan sesuai hasil Analisis Jabatan dengan beberapa faktor penilaian terhadap tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing.

7. Meningkatkan **Kualitas Pelayanan Publik;**

Pelayanan publik menjadi wacana menarik dewasa ini. Yang dibicarakan berkisar dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak, semakin beragamnya produk pelayanan yang diselenggarakan penyelenggara negara hingga derasnya arus pengawasan terhadap proses penyelenggaran pelayanan publik. Tak pelak lagi, inilah salah satu perkembangan luar biasa dalam dinamika pembangunan di wilayah Papua. Dari sudut pandang penyelenggara pelayanan publik, ada keinginan memperkaya ragam pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat, pun tak lupa senantiasa ditingkatkan kualitasnya. Berbagai upaya penyederhanaan prosedur, pemangkasan waktu pelayanan dan peningkatan efisiensi biaya pelayanan terus-menerus disempurnakan oleh setiap unit penyelenggara pelayanan.

Peningkatan semangat melayani masyarakat juga dibarengi dengan makin terbukanya pola pikir Pemerintah dalam pelibatan masyarakat guna merumuskan perbaikan proses pelayanan. Keterbukaan ini masih ditambah dengan kesediaan menerima dan mengelola keluhan masyarakat yang merupakan umpan balik penyempurnaan proses pelayanan publik. Pelayanan publik, sebagaimana tertuang dalam UU 25/2009, dimaknai sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang ini wajibkan negara memberikan pelayanan publik bagi setiap warga negara.

Menindaklanjuti undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Peraturan Gubernur terkait hal tersebut. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat. Ini berarti, negara berkewajiban dan bertanggungjawab atas pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakatnya demi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

Ada kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik antara lain:

1. Standar Pelayanan, Pemerintah perlu menetapkan standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan publik. Hal ini mencakup waktu layanan, kualitas layanan, dan aspek lain yang memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang memadai.
2. Survei Kepuasan Masyarakat, Survei secara berkala harus dilaksanakan

untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan. Hasil survei ini menjadi dasar untuk melakukan perbaikan atau peningkatan layanan jika diperlukan

3. Forum Konsultasi Publik, Forum ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan layanan publik. Forum Ini penting dilaksanakan untuk melihat sejauh mana peran serta masyarakat terkait aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam kaitannya terhadap pelayanan publik. Forum ini bisa meliputi pertemuan langsung, diskusi daring, atau mekanisme lain yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, masukan, atau keluhan mereka

Ketiga kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penyelenggara layanan publik khususnya perangkat daerah telah mencapai tujuan mereka dan seberapa baik mereka telah memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini dapat terlihat melalui Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota di Wilayah Papua.

Tujuan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dalam sistem manajemen pemerintahan. Reformasi Birokrasi mencakup delapan area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, meliputi: organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan,

sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, mind set dan culture set aparatur.

Pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Upaya penataan Tata Laksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dilakukan dalam beberapa kegiatan:

1. Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Tata Naskah Dinas
2. Penyusunan Peraturan Gubernur Papua tentang Pakaian Dinas
3. Penyusunan Peta Proses Bisnis
4. Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan
5. Peningkatan Penataan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja

Ketatalaksanaan pemerintah merupakan pengaturan tentang cara melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah daerah. Lima kegiatan tersebut di atas merupakan komponen penting dalam tata laksana pemerintahan.

8. Peningkatan Tata Laksana Pemerintahan

Standar Operasional Prosedur (SOP) bisa diartikan sebagai suatu petunjuk organisatoris yang menetapkan suatu tindakan baku. SOP berisi petunjuk yang menjelaskan cara yang diharapkan dan diperlukan oleh pekerja/petugas dalam melakukan/menyelenggarakan pekerjaan mereka. Dalam pemerintahan, penerapan SOP merupakan sebuah keharusan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dalam hal pemerintahan, SOP bermanfaat untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan masyarakat. Penerapan SOP dalam pelayanan pemerintahan perlu diperhatikan antara struktur organisasi dan pembagian tugas dalam pemerintahan serta dikaitkan dengan beberapa hal penting dalam penerapan SOP, yakni: efisiensi, konsistensi, minimalisasi kesalahan, penyelesaian masalah, perlindungan tenaga kerja (pegawai), peta kerja dan batasan pertahanan.

9. Isu strategis reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja

Isu Strategis dari Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja (Bagian RBA) pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua adalah “PENGUATAN KAPASITAS”. Penguatan Kapasitas kepada Sumber Daya Manusia yang melakukan Tupoksi nya maupun juga Penguatan Kapasitas secara Kelembagaan yang melukan Tusi Organisasi nya.

Penguatan Kapasitas dilakukan bagi Konstituen yaitu Penerima Layanan/Penerima Manfaat dari Bagian RBA yaitu :

1. SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan
2. Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.

Kedua Konstituen diatas merupakan Penerima Layanan/Penerima Manfaat dari apa yang dilakukan oleh Bagian RBA secara konstinue setiap Tahun dan berkelanjutan.

Penguatan Kapasitas yang dilakukan setiap tahun oleh Bagian RBA melalui 3 Hal yaitu :

1) Pembinaan

Pembinaan yang sering dilakukan oleh Bagian RBA setiap tahun adalah mensosialisasikan berbagai aturan yang terkait dengan Tupoksi di Bagian RBA. Proses Sosialisasi ini dilakukan secara kontinue dan berkelanjutan agar terdapat pemahaman yang baik bagi Konstituen Bagian RBA.

2) Pendampingan

Setelah dilakukan Pembinaan mereka dapat melaksanakan berbagai aturan yang telah di sosialisasikan dalam Tupoksi mereka masing-masing.

3) Monitoring dan Evaluasi (Monev).

Setelah Konstituen diberikan Pembinaan dan Pendampingan maka selanjutnya Bagian RBA akan melakukan tahapan selanjutnya yaitu melakukan Monev dari apa yang sudah diberikan lewat pembinaan dan Pendampingan seperti salah satunya yaitu Rencana Tindak Lanjut (RTL). Dengan ada nya RTL tersebut maka proses-proses Penguatan Kapasitas akan terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan Konstituen.

Berikut adalah Proses Penguatan Kapasitas pada Sub Bagian Reformasi Birokrasi, Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja serta Sub Bagian Budaya Kerja.

4) Reformasi Birokrasi

Beberapa Isu Strategis dalam perjalanan Reformasi Birokrasi pada periode ketiga (2020-2024) sesuai dengan Peraturan Kementerian PANRB RI Nomor 3 Tahun 2023 yaitu Perubahan atas PERMENPANRB Nomor 25/2020 tentang Road Map RB Tahun 2020-2024 yaitu seputar 21 Indikator dalam RB General yaitu :

1. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
2. Indeks SPBE
3. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE
4. Indeks Perencanaan Pembangunan
5. Nilai SAKIP
6. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
7. Tingkat Maturitas SPIP
8. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan
9. Sudah Diselesaikan
10. Survei Penilaian Integritas (SPI)
11. Indeks Kualitas Kebijakan
12. Indeks Reformasi Hukum
13. Tingkat Digitalisasi Arsip
14. Indeks Pembangunan Statistik
15. Indeks Tata Kelola Pengadaan
16. Opini BPK
17. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
18. Indeks Sistem Merit

19. Indeks BerAkhlas
20. Survei Kepuasan Masyarakat
21. Indeks Pelayanan Publik
22. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
23. Juga RB Tematik yaitu
24. Pengentasan Kemiskinan
25. Realisasi Investasi
26. Digitalisasi Pemerintahan (Stunting)
27. Penggunaan Produk Dalam Negeri dan
28. Pengendalian Inflasi

Reformasi General dan Reformasi B Tematik ini dikawal setiap Tahun oleh Pemerintah Daerah dan di Laporkan pelaksanaannya kepada Pemerintah melalui KEMENPANRB RI yaitu pada portal Reformasi Birokrasi Nasional PANRB yaitu www.portalrb.id

Indeks Reformasi Birokrasi juga masuk dalam penentuan besaran TPP (Tunjangan Kinerja ASN) yang dimasukkan dalam aplikasi Kemenadgri yaitu Simona. Indeks Reformasi Birokrasi sebagai salah satu Penilaian dalam Tata Kelola Pemerintahan

5) Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, terdapat beberapa hal yang menunjukkan akuntabilitas kinerja masih lemah, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum diimplementasikan secara nyata dan konsisten, diantaranya:

1. Kurangnya komitmen dalam mengedepan-kan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar, terutama di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
2. Adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang akuntabilitas kinerja yang kurang selaras;
3. Belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi pemerintah yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
4. Masih belum tersosialisasikannya ke seluruh instansi pemerintah tentang kebijakan di bidang akuntabilitas;
5. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah serta;
6. Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan nasional dan sistem penganggaran.
7. Untuk strategi ke depan dilaksanakan melalui:
8. Menyusun dan mendorong penyusunan Peraturan perundang-undangan mengenai akuntabilitas Kinerja;
9. Sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terhadap penerapan Sistem AKIP kepada instansi pemerintah pusat maupun daerah yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk lebih meningkatkan kualitas dan memperkuat implementasi Sistem AKIP;
10. Melaksanakan evaluasi LAKIP dengan tujuan menilai kualitas implementasi Sistem AKIP dan menilai kinerja instansi pemerintah serta mendorong perbaikan kualitas implementasi sistem AKIP;
11. Mendorong pengembangan model percontohan yaitu suatu pemerintah daerah/wilayah yang dijadikan model penerapan prinsip good governance sehingga wilayah tersebut dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, serta dapat dijadikan model/contoh bagi pemerintah daerah lainnya.

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemda kepada Pemerintah melalui KEMENPANRB RI yaitu pada aplikasi e-SAKIP Reviu (ESR). Pelaporan Kinerja Pemda ini di Laporkan setiap Awal tahun sesudah Tahun Anggaran yang lama berakhir. Pelaporan Kinerja ini yang sering kita sebut LAKIP juga LKJIP namun tetap sama Laporan nya karena masih menggunakan Dasar Hukum yang sama untuk Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja yaitu PERMENPANRB RI No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Laporan Kinerja. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemda menjadi pintu masuk dalam menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui SAKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Komponen SAKIP ada 4 (Empat) yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja, sehingga salah satu komponen penting yang di ukur untuk melihat jalannya SAKIP dalam Pemda adalah melalui Pelaporan Kinerja yang sering kita sebut LAKIP/LKj/LKjIP).

6) Budaya Kerja

Budaya Kerja merupakan Nilai-Nilai yang dianut dalam sebuah wadah/organisasi/perkumpulan. Nilai-Nilai tersebut menjadi pengikat untuk semua manusia dalam wadah/organisasi/perkumpulan dalam menjalankan Tusi wadah/organisasi/perkumpulan nya.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Papua maka telah ada Nilai-Nilai yang dianut bagi Pemerintah Provinsi Papua yang didalam nya berisikan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjalankan Nilai-Nilai Budaya Kerja yaitu “BerAKHLAK”

Berorientasi Pelayanan : yaitu Komitmen memberikan Pelayanan Prima demi Kepuasan Masyarakat

Akuntabel : Bertanggungjawab atas Kepercayaan yang diberikan

Kompeten : yaitu Terus Belajar dan mengembangkan Kapabilitas

Harmonis : yaitu Saling Peduli dan Menghargai Perbedaan

Loyal : yaitu Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

Adaptif : Terus berinovasi dan antusias dalam menggunakan serta menghadapi perubahan

Kolabiratif : yaitu Membangun kerjasama yang sinergis.

Peraturan Gubernur Nomor 41/2023 tersebut baru tersusun di Tahun 2023, jadi di Tahun 2024 hingga Tahun 2025 lebih kepada Sosialisasi kepada Konstituen/Penerima Layanan/Penerima Manfaat dari Pergub ini yaitu ASN di tiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua juga bagi Kabupaten/Kota se Provinsi Papua melalui Bagian Organisasi nya.

Sub Bagian Budaya Kerja juga membuat arah kebijakan Budaya Kerja dalam bentuk Penyusunan Road Map Budaya Kerja sehingga menjadi Pijakan Bersama bagi Provinsi Papua dalam implemtasi Budaya Kerja.

Harapan dari semua nya adalah terciptanya Budaya Birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang Profesional yang ditandai oleh peningkatan Nilai Budaya Kerja oleh Pemerintah melalui Kementerian PAN dan RB RI yaitu terkait dengan 2 Indikator yaitu Nilai Survei

Employer dan Nilai Survei Indeks berAKHLAK yang di nilai setiap Tahun dan masuk dalam kategori Indeks Reformasi Birokrasi bagi Pemerintah Provinsi Papua.

Bila dikaitkan dengan isu strategis Pemerintah Provinsi Papua pada Peraturan Gubernur Nomor 5/2023 tentang RPD Provinsi Papua ada keterkaitan yaitu pada point 5 melalui penyelarasan dan pertimbangan, dari 6 (enam) isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Papua tahun 2024 – 2026, yaitu sebagai berikut.

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi);
2. Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan berbasis Komoditas dan Karakteristik Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur
3. Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten
4. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim;

5. Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang baik.

Isu strategis ini merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi yang melaksanakan fungsi administrasi dalam pelaksanaan pembangunan sumberdaya manusia aparatur yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa mendatang. Isu strategis juga menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan RENSTRA yang mempunyai target, sasaran yang harus dicapai.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan Program/kegiatan/Sub Kegiatan direncanakan sesuai kebutuhan pelaksanaan TUSI organisasi sesuai sasaran strategis organisasi yang ditetapkan dalam RENSTRA SKPD yang ditargetkan untuk Tahun 2024-2026.

RKPD merupakan bagian dari RENSTRA SKPD adanya beberapa indicator yang menjadi target dalam RKPD menjadi bagian indicator Biro Organisasi, yang direncanakan melalui musrenbang pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum PD) dengan DPRP.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tujuan Biro Organisasi yang akan dicapai untuk masa waktu pembangunan 2024-2026 adalah “Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik” merupakan target

Visi Provinsi Papua pada RPJPD yaitu **“Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik.”** Dan Misi ke-3 yaitu **“ untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi,** Visi tersebut memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan tahap IV diantaranya tersambung dari segi kemandirian pada segala bidang, dari 4 (empat) Tujuan pada RPD Tahun 2024-2026 tujuan ke 4 yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik”** bersinergi dengan Tujuan pada RENSTRA Biro Organisasi yaitu **“Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik”**

Tujuan 4: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua
2. Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Visi dan Misi serta tujuan diaktualisasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Organisasi berpedoman pada tugas pokok dan fungsi organisasi sebagaimana terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2023.

Untuk mendukung Visi Misi pembangunan Provinsi Papua, Biro Organisasi merumuskan tujuan yakni **“Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik”** Tujuan Biro Organisasi diatas dijabarkan pada sasaran-sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang bersinergi dengan RPD Provinsi Papua, yaitu terdiri atas 3 (tiga) indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Biro Organisasi yang bersinergi dengan Tujuan dan Sasaran pada Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Papua

Tahun 2024-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode 2023	Taarget Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir tahun 2026
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67	75,05	80,05	80.50	80.50	
2	Nilai SAKIP	Nilai	66,05	75,39	80,05	80,50	80,50	
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	95	95	95	95	95	

Adapun tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan Biro Organisasi dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator dan target Kinerja Serta Target Lima Tahun Kedepan

RENSTRA Biro Organisasi telah terintegrasi dengan RPD ta 2024-2026 dan sasaran strategis KemenPANRBI, Kualitas perencanaan dapat dinilai dari sejauhmana integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan

dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dapat diwujudkan dalam setiap perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran RENSTRA Biro harus mendukung sasaran strategis RPD dan sasaran strategis Kementerian, Dengan demikian, sinergi perencanaan pusat dan daerah diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan. Berikut ini adalah keterhubungan sasaran-sasaran RENSTRA Biro dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024-2026 dan RPD Provinsi Papua , sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Hubungan antara , Visi, Misi PEMDA Provinsi Papua, Biro Organisasi dan KemenPANRB R.I

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA TA. 2024-2026	RENSTRA BIRO ORGANISASI TA 2024-2026	RENSTRA KEMENPANRB 2020-2024
VISI : “Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik.”		Visi : “Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan”
MISI ke-3 “ untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan bebas dari korupsi	Misi : 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Analisis Jabatan mewujudkan organisasi Pemerintah daerah yang rasional. 2. Meningkatkan pembinaan Sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efisiensi dan efektif. 3. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM aparatur	MISI : 1. . Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, 2. Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – digital bureaucracy. 3. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel 4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas. 5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani. 6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.bermartabat, dan

		terpercaya
--	--	------------

PRIORITAS		
Prioritas difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai ABK 2. Tatalaksana pemerintahan yang efisiensi , efektif, responsif, transparan dan akuntabel 3. Penempatan, Pengembangan dan pengendalian aparatur yang berorientasi pada ANJAB dan bermuara pada penerapan sistem merit 	Mewujudkan Integritas, profesional dan akuntabel,melayani kolaboratif, informatif dan kesempurnaan/komitmen pada kualitas
TUJUAN “		
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing 2. Terwujudnya Kementerian PANRB yang Berkualitas dan Kapabel

<p>2. Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua</p> <p>3. Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua</p> <p>4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</p> <p>5. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</p>	<p>3. Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsive, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi</p> <p>4. Terwujudnya ASN yang professional, berintegritas, dan sejahtera</p> <p>5. Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel</p> <p>6. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas</p> <p>7. Terwujudnya kualitas pelayanan public yang prima</p> <p>8. Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional</p> <p>9. Terwujudnya kelembagaan Kementerian PANRB yang efektif dan efisien</p> <p>10. Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang professional, berintegritas, dan sejahtera</p> <p>11. Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkinerja tinggi, dan akuntabel</p> <p>12. Terwujudnya kualitas pelayanan public Kementerian PANRB yang prima</p>
--	---

<p>Arah Kebijakan Tahun 2024</p> <p>Pembangunan Provinsi Papua di tahun 2024 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan</p> <p>Arah Kebijakan Tahun 2025</p> <p>Pembangunan Provinsi Papua di tahun 2025 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu <i>Percepatan Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</i></p> <p>Arah Kebijakan Tahun 2026</p> <p>Pembangunan Provinsi Papua di tahun 2026 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Percepatan Pembangunan Struktur Ekonomi yang Inklusif Melalui Akselerasi Potensi Unggulan Daerah</p>	<p>2. Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien, efektif dan akuntabilitas</p>	<p>1 Reformasi kelembagaan dan ketatalaksanaan 2 Penguatan implementasi manajemen ASN berbasis merit 3 Peningkatan kualitas implementasi SAKIP 4 Penguatan pengawasan 5 Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan public 6 Peningkatan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi</p>
--	--	---

STRATEGI			
1. Meningkatkan kinerja kelembagaan dengan memperbaiki prosedur kerja (business process)	1 Melakukan pertemuan/clinick dan menyebarluaskan kuisioner, dan melakukan pengumpulan data	9 Penetapan Road Map RB 2015-2019 dan Juklak RB	
PROGRAM			
Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan	Penguatan kapasitas Kelembagaan	Program Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pendayagunaan

Kementerian PANRB telah merumuskan visi tahun 2020-2024 yaitu “Mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi untuk mencapai pemerintahan yang berkelas dunia ”. Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Kementerian PANRB untuk menjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah yang profesional dalam melaksanakan tugasnya serta memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya, demikian halnya dengan Biro Organisasi yang mengembang visi dan misi pemerintah daerah yang lebih

mengedepankan pelayanan administrasi dan pembangunan SDM sebagai aktualisasi dari implementasi regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan keterkaitan dengan RPD Provinsi Papua nampak pada prioritas pelaksanaan visi dan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program yang dilaksanakan, hal ini memberi konsekwensi bahwa Biro organisasi harus mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan sehingga perencanaan dari Tahun pertama sampai tahun ke 2 ada progres capaian yang signifikan.

Hal ini sejalan dengan RENSTRA Biro organisasi yang lebih mengedepankan pelayanan administrasi dan pembangunan SDM dalam sebagai aktualisasi dari implementasi regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, demikian halnya dengan visi dan Visi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sangat erat kaitannya dengan capaian pelaksanaan tugas tugas organisasi, sedangkan keterkaitan dengan RPD Provinsi Papua nampak pada prioritas pelaksanaan visi dan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program yang dilaksanakan, hal ini memberi konsekwensi bahwa Biro organisasi harus mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan sehingga perencanaan dari Tahun pertama sampai tahun ke lima ada progres capaian yang signifikan, sebagaimana capaian kinerja yang telah dilakukan Biro Organisasi selama hampir 5(lima) tahun masa pemerintahan Gubernur Lukas Enember di Provinsi Papua.

3.2 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2025 dengan berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah akan melaksanakan 2 program, 6 kegiatan, dan 16 sub kegiatan.(Program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator program) tersebut dapat dilihat pada RENJA 2025 Tabel 2.1 pada lampiran.

BAB IV **PENUTUP**

Rencana Kerja Biro Organisasi merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan kegiatan administrasi Pemerintahan selama satu tahun anggaran.

Rencana Kerja Biro dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta menjunjung nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat dan bangsa secara pribadi.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.

Demikian Rencana Kerja Biro ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai perencanaan strategis yang ditetapkan.

Jayapura, 17 Februari 2025



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH PRVINSI PAPUA TAHUN 2024 - 2026

SKPD : BIRO ORGANISASI SERTA PROVINSI PAPUA

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub kegiatan (Output)	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
01.	PROGRAM PENUNJANG URSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Terwujudnya pelayanan administrasi umum dan jasa penunjang Biro Organisasi	Persentase OPD dalam peningkatan pelayanan administrasi jasa penunjang Biro Organisasi	Meningkatnya pelayanan administrasi kantor Biro Organisasi	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pemusatan Dokumen RKA SKPD	100%		100%		100%		100%		4.01.00.00.00.05. Biro Organisasi	
01.101.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Biro Organisasi	Persentase Administrasi OPD dalam mendukung pelaksanaan TUPOKSI			100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	4.01.00.00.00.05. Biro Organisasi	
01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pemusatan Dokumen RKA SKPD			1 dokumen	-	1 dokumen	6,720,000	1 dokumen	7,728,000	1 dokumen	14,448,000	4.01.00.00.00.05. Biro Organisasi	
01. 1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pemusatan Dokumen Perubahan RKA- SKPD			1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	51,000,000	1 dokumen	51,000,000	4.01.00.00.00.05. Biro Organisasi	
01.1.01.04	Koordinasi dan Pemusatan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pemusatan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pemusatan Dokumen DPA- SKPD			1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	4.01.00.00.00.05. Biro Organisasi	
01.1.01.05	Koordinasi dan Pemusatan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pemusatan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pemusatan Dokumen Perubahan DPA - SKPD			1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	4.01.00.00.00.05. Biro Organisasi	
01.1.01.06	Koordinasi dan Pemusatan Laporan Capain Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pemusatan Laporan Capain Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pemusatan Laporan Capain Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD			4 dokumen	-	4 dokumen	6,720,000	4 dokumen	7,728,000	4 dokumen	14,448,000	4.01.00.00.00.05. Biro Organisasi	
01. 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Biro Organisasi	Persentase administrasi Keuangan Biro Organisasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4.01.00.00.00.05. Biro Organisasi	
01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pemusatan laporan Keuangan Akhir Tahun			100%	-	100%	8,000,000	100%	9,200,000	100%	17,200,000	4.01.00.00.00.05. Biro Organisasi	
01.102.07	Koordinasi dan Pemusatan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan, Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pemusatan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan/ Bulanan/Triwulan/Semestran SKPD dan laporan koordinasi Pemusatan laporan Keuangan/ Bulanan/Triwulan,Semestran SKPD			1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	4.01.00.00.00.05. Biro Organisasi	
01.104.01	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya	Terlaksananya Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya	Jumlah Paket Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya			Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	4.01.00.00.00.05. Biro Organisasi	
01.104.08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti			Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	4.01.00.00.00.05. Biro Organisasi	
01.104.09	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	4.01.00.00.00.05. Biro Organisasi	
01.104.10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan			Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	4.01.00.00.00.05. Biro Organisasi	
01.105.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Biro Organisasi	Persentase Administrasi Umum Biro Organisasi			100%		100%		100%		100%		4.01.00.00.00.05. Biro Organisasi	

01.105.02	Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan
01.105.03	Peyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Peyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di Sediakan
01.105.04	Peyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
01.105.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetakan dan Pengadaan yang di Sediakan
01.105.07	Penyediaan Bahan/ Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang di Sediakan
01.105.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi Tamu
01.105.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
01.105.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penata Usahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
1.107	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase jasa penunjang perlengkapan kantor yang disediakan
01.107.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan
1.108	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara dan teradministrasi dengan baik	Persentase Pemeliharaan dan penetrasi administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan
1.108.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Oprasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang di Pelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya
1.108.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Terwujudnya penataan Organisasi	Persentase penataan Organisasi
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analis Jabatan	Terwujudnya pemataan Kelembagaan dan Analis Jabatan Provinsi dan Kab/Kota	Persentase Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan OPD Provinsi dan Kab/Kota
4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Terlaksananya Penataan kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing)	1. 1. Presentase OPD yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran
			1.2. Jumlah PERDA dan PERGUB di Bidang Kelembagaan
4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengawasan kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota
	Rapat Kerja koordinasi Bidang Organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab.Kota	Terlaksananya Rapat Kerja koordinasi Bidang Organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab.Kota	kelembagaan perangkat daerah kab/kota yang sesuai kebutuhan dan Peraturan yang berlaku
	Monitoring dan Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kab.kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kab.kota	Cakupan monitoring dan evaluasi data kelembagaan perangkat daerah kab/kota

Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	4.01.0.00.0.0.05. Biro Organisasi
Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	4.01.0.00.0.0.05. Biro Organisasi
Paket	24,000,000	Paket	18,000,000	Paket	20,700,000	Paket	62,700,000	4.01.0.00.0.0.05. Biro Organisasi
Paket	520,115,620	Paket	184,594,000	Paket	212,283,100	Paket	916,992,720	4.01.0.00.0.0.05. Biro Organisasi
Paket	101,320,540	Paket	105,401,000	Paket	121,211,150	Paket	327,932,690	4.01.0.00.0.0.05. Biro Organisasi
Laporan	236,400,000	Laporan	140,000,000	Laporan	161,000,000	Laporan	537,400,000	4.01.0.00.0.0.05. Biro Organisasi
Laporan	645,325,000	Laporan	358,295,000	Laporan	412,039,250	Laporan	1,415,659,250	4.01.0.00.0.0.05. Biro Organisasi
Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	4.01.0.00.0.0.05. Biro Organisasi
persentase	-	persentase	-	persentase	-	persentase	-	4.01.0.00.0.0.05. Biro Organisasi
Laporan	63,750,000.0	Laporan	52,830,000	Laporan	60,754,500	Laporan	177,334,500	4.01.0.00.0.0.05. Biro Organisasi
persentase	100%	persentase	100%	persentase	100%	persentase	100%	4.01.0.00.0.0.05. Biro Organisasi
Unit	157,232,000	Unit	62,280,000	Unit	71,622,000	Unit	291,134,000	4.01.0.00.0.0.05. Biro Organisasi
3 Unit	3	3 Unit	65,000,000	Unit	74,750,000	Unit	Rp139,750,003,00	4.01.0.00.0.0.05. Biro Organisasi
persentase	-	persentase	-	persentase	-	persentase	-	4.01.0.00.0.0.05. Biro Organisasi
dokumen	100%	dokumen	100%	dokumen	100%	dokumen	100%	4.01.0.00.0.0.05. Biro Organisasi
100%	350,000,000	100%	250,000,000	100%	287,500,000	100%	887,500,000	4.01.0.00.0.0.05. Biro Organisasi
1 PERDA dan 43 PERGUB	1 PERDA dan 43 PERGUB	1 PERDA dan 47 PERGUB	4.01.0.00.0.0.05. Biro Organisasi					
10 PERGUB UPT dan Cabang Dinas	10 PERGUB UPT dan Cabang Dinas	12 PERGUB UPT dan Cabang Dinas	4.01.0.00.0.0.05. Biro Organisasi					
9 kab.kota	600,000,000	9 kab.kota	499,751,000	9 kab.kota	574,713,650	9 kab.kota	1,674,464,650	4.01.0.00.0.0.05. Biro Organisasi
9 kab.kota	-	4.01.0.00.0.0.05. Biro Organisasi						
35%	-	35%	-	30%	-	100%	-	4.01.0.00.0.0.05. Biro Organisasi

4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Terlaksananya penataan SDM aparatur yang kompeten	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis jabatan , Analisis beban kerja dan Evaluasi jabatan	Persentase Kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai Persentase Tatalaksana pemerintahan yang efisiensi , efektif, responsif, transparan dan akuntabel	100%	1,149,997,450	100%	500,000,000	100%	575,000,000	100%	2,224,997,450	4.01.00.00.00.05. Biro Organisasi
4.01.02.1.02.01	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Reformasi Birokrasi, SAKIP dan budaya kerja Pemerintah		dokumen/laporan		dokumen/laporan		dokumen/laporan		dokumen/laporan		- 4.01.00.00.00.05. Biro Organisasi
4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi akuntabilitas kinerja	1. Nilai evaluasi Sakip Provinsi Papua; 2. Presentase SKPD yang mengumpulkan Sakip; 3. Presentase kab/kota yang melaporkan Sakip.		60%	300,002,000	80%	299,028,000	100%	343,882,200	100%	942,912,200	dokumen/laporan
4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Terlaksananya Evakuasi Pelaksanaan Budaya Kerja pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	1. Presentase SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua melaksanakan Budaya Kerja; 2. Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja dalam pelaksanaan tugas; 3. Presentase ASN di		B	-	B		BB		A		4.01.00.00.00.05. Biro Organisasi
4.01.02.1.02.04	Fasilitasi peningkatan pelayanan publik	Terlaksananya Fasilitasi peningkatan pelayanan publik di Provinsi dan Kab/Kota	Percentase SKPD Provinsi yang melaksanakan SPP		40%	99,999,900	60%	299,968,000	80%	344,963,200	100%	744,931,100	4.01.00.00.00.05. Biro Organisasi
4.01.02.1.02.05	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Terlaksananya Pengelolaan tatalaksana pemerintahan	Percentase UPP Provinsi yang melaksanakan SPP		100%	-	100%						4.01.00.00.00.05. Biro Organisasi
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi		30%	-	60%		100%				4.01.00.00.00.05. Biro Organisasi
			Percentase SOP SKPD dan mendapat penetapan dengan SK Gubernur		-	300,002,200	60%	499,675,000	100%	574,626,250		1,374,303,450	4.01.00.00.00.05. Biro Organisasi
			Percentase SKPD yang memiliki SOP yang sesuai dengan Tugas Pokok dan /Fungsi		-	-	100%		100%		100%		4.01.00.00.00.05. Biro Organisasi
			Jumlah SKPD yang di evaluasi penerapan SOP-nya		15 SKPD	-	10 SKPD		15 SKPD		-		4.01.00.00.00.05. Biro Organisasi
			Percentase SKPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama		-	-	100%		100%		100%		4.01.00.00.00.05. Biro Organisasi

11



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara



RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO ORGANISASI PROVINSI PAPUA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / KEGIATAN SUB / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENCRA OPD TAHUN 2023	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRIAN MAJU RENCANA TAJUUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO ORGANISASI														
4		UNSUR PENDUKUNG														
		URUSAN PEMERINTAHAN														
4.01		SEKRETARIAT DAERAH														
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
4.01.01.1.01		Perekembangan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							10.000.000,00							
4.01.01.1.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	Senusa Kota/Kab, Senusa Kecamatan, Senusa KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penitigka tan Tala Kela Pem eritahan	-	30.000.000,00	BIRO ORGANISASI
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	Senusa Kota/Kab, Senusa Kecamatan, Senusa KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penitigka tan Tala Kela Pem eritahan	-	30.000.000,00	BIRO ORGANISASI
4.01.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja dan SKPD														
4.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.486.056.000,00	2.486.056.000,00							
4.01.01.1.02.0001		Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Memerlukan Gaji dan Tunjangan ASN					56 Orang/ Bulan	2.476.056.000,00	Kota Jayapura, Senusa Kota/Kab, Senusa Kecamatan, Senusa KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penitigka tan Tala Kela Pem eritahan	-	6.527.356.200,00	BIRO ORGANISASI	
4.01.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	5.000.000,00	Senusa Kota/Kab, Senusa Kecamatan, Senusa KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penitigka tan Tala Kela Pem eritahan	-	25.000.000,00	BIRO ORGANISASI	
4.01.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trikulum/Sumstern SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN SUB / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET REALISASI CARAAN RENCRA RENCRA OPD OPD TAHUN TAHUN 2023	PRAKIRJAAN CAPAAN TARGET RENJA 2024	CAPAJAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELLOMPOK SASARAN	PRAKIRJAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
						REALISASI CARAAN TARGET RENJA 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Timbulan/Semesteran SKD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Timbulan/Semesteran SKD			12 Laporan	5.000.000,00	Semu Kotakab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningka tan Tata Kela Pem erintahan	-			30.000.000,00	BIRO ORGANISASI	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	120.000.000,00			-	3. Peningka tan Tata Kela Pem erintahan	-			500.000.000,00	BIRO ORGANISASI	
4.01.01.1.05.0009	Penyedian dan Pelaporan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50 Orang	120.000.000,00	Semu Kotakab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningka tan Tata Kela Pem erintahan	-			500.000.000,00	BIRO ORGANISASI	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	1.197.000.800,00			-	3. Peningka tan Tata Kela Pem erintahan	-			3.587.316.000,00	BIRO ORGANISASI		
4.01.01.1.06.0002	Penyedian Perjalanan dan Pengangkutan Kantor	Jumlah Paket Perjalanan dan Pengangkutan Kantor yang Disediakan		35 Paket	67.000.000,00	Semu Kotakab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningka tan Tata Kela Pem erintahan	-			350.000.000,00	BIRO ORGANISASI		
4.01.01.1.06.0003	Penyedian Perjalanan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perjalanan Rumah Tangga yang Disediakan		5 Paket	10.000.000,00	Semu Kotakab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningka tan Tata Kela Pem erintahan	-			60.000.000,00	BIRO ORGANISASI		
4.01.01.1.06.0004	Penyedian Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	24.000.000,00	Semu Kotakab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningka tan Tata Kela Pem erintahan	-			24.000.000,00	BIRO ORGANISASI		
4.01.01.1.06.0005	Penyedian Bahan Logistik dan Pengangkutan	Jumlah Paket Bahan Logistik Cetakan dan Pengangkutan yang Disediakan		12 Paket	224.550.000,00	Semu Kotakab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningka tan Tata Kela Pem erintahan	-			850.000.000,00	BIRO ORGANISASI		
4.01.01.1.06.0006	Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN SUB / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB / KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA TAHUN 2023 ODD	REALISASI CAPAIAN RENCANA TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPIAN TARGET RENJA OPD TAHIN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUJ JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITY				
										NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Jumlah Kondraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jelajah yang Dipelihara dan Dibayarkan Projeknya					13 Unit	59.328.200,00		Semua KotakKab, Semua Kecamatan, Semua Kot/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningka tan Tala Kebala Pem erintaham	150.000.000,00	BIRO ORGANISASI	
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERATAAN ORGANISASI	-	-	-	-	-	2.600.000.000,00						7.850.000.000,00		
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kebijaksanaan dan Analisis Jabatan	-	-	-	-	-	1.350.000.000,00						3.500.000.000,00	BIRO ORGANISASI	
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penilaian Kebijaksanaan Provinsi														
		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kebijaksanaan Kabupaten/Kota					44 Dokumen	350.000.000,00		Semua KotakKab, Semua Kecamatan, Semua Kot/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningka tan Tala Kebala Pem erintaham	1.000.000.000,00	BIRO ORGANISASI	
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penilaian Kebijaksanaan Kabupaten/Kota					9 Dokumen	600.000.000,00		Semua KotakKab, Semua Kecamatan, Semua Kot/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningka tan Tala Kebala Pem erintaham	1.000.000.000,00	BIRO ORGANISASI	
	4.01.02.1.01.0003	Penilaian Analisis Jabatan					1 Dokumen	400.000.000,00		Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kot/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningka tan Tala Kebala Pem erintaham	1.500.000.000,00	BIRO ORGANISASI	
		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Analisis Jabatan, Analisis Bahan Kerja, dan Evaluasi Jabatan														
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	-		1.250.000.000,00						4.150.000.000,00	BIRO ORGANISASI	
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi					1 Dokumen	300.000.000,00		Semua KotakKab, Semua Kecamatan, Semua Kot/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningka tan Tala Kebala Pem erintaham	800.000.000,00	BIRO ORGANISASI	
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja														
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja					1 Dokumen	300.000.000,00		Semua KotakKab, Semua Kecamatan, Semua Kot/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningka tan Tala Kebala Pem erintaham	800.000.000,00	BIRO ORGANISASI	
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN SUB / KEGIATAN	TARGET REALISASI CAPAIAN PERIODE RENTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKRAAN KELompok SASARAN	PRAKRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
					PRAKRAAN TARGET 2025	PRAKRAAN TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	NASIONAL	15	16
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Karya			1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kotakab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM	-	DAERAH	350.000.000,00	BIRO ORGANISASI
		Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kotakab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM	-	3. Peningka tan Tata Kebaik an Pem erintahan	-	1.200.000.000,00	BIRO ORGANISASI
		4.01.02.1.02.0004										
		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kotakab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASIUMUM	-	3. Peningka tan Tingkat Ketua Pen erintahan	-	800.000.000,00	BIRO ORGANISASI
			JUMLAH		6.579.988.000,00						18.705.672.200,00	

MENGETAHUI,
Pj KARO BIRO ORGANISASI

FILIPUS LUKYANAN S.Sos
PEMBINA TK.I
NIP. 19660929 199203 1 004